



KEPALA DESA PULOSARI  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI  
NOMOR .....TAHUN.....

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA PULOSARI

BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

(PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun Jalan Tol Semarang-Demak;

b. bahwa untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak Nomor TN.11.01/440357/04/IV/2021-39 perihal Permohonan Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Pulosari tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Pulosari bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI  
dan  
KEPALA DESA PULOSARI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA PULOSARI BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pulosari dan Perangkat Desa Pulosari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;



- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

## BAB II PENGUNAAN TANAH KAS DESA

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun Jalan Tol Semarang-Demak.
- (2) Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Uang.

## BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

### Pasal 3

Tanah Kas Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah yang ditukar adalah tanah seluas 8.163 m<sup>2</sup> Desa dengan rincian :

- (1) Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bengkok Modin) seluas 1.269 m<sup>2</sup> ;
- (2) Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Bothok) seluas 1.688 m<sup>2</sup> ;
- (3) Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Gudangan) seluas 5.206 m<sup>2</sup> ;

## BAB IV GANTI UANG

### Pasal 4

- (1) Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp. 2.943.113.600,- (dua milyar sembilan

ratus empat puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

- a. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bengkok Modin) seluas 1.269 m<sup>2</sup> dengan ganti uang Rp. 468.356.000,-
- b. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Bothok) seluas 1.688 m<sup>2</sup> dengan ganti uang Rp. 616.994.880,-
- c. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Gudangan) seluas 5.206 m<sup>2</sup> dengan ganti uang Rp. 1.857.762.720,-

(2) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah.

### BAB V SERTIFIKASI

#### Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Pulosari menjadi tanggungjawab PPK Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pulosari sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

Ditetapkan di Desa Pulosari

Pada tanggal .....

KEPALA DESA PULOSARI

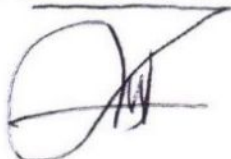


**TAUFIKUR ROHMAN**

Diundangkan di Desa Pulosari

Pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA PULOSARI



**ANDI ROHMAN**

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN ..... NOMOR .....